



AL QODIRI

JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL DAN KEAGAMAAN

Jln. Manggar 139-A Gebang Poreng Po.Box.161-Patrang Jember Jawa Timur
<http://ejournal.kopertais4.or.id/tapalkuda/index.php/qodiri>

Tugas Dinas Pariwisata Dalam Pengelolaan Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Ende Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten Ende

Oleh:

Mario Hardi Kusuma

Universitas Surabaya

mariohardikusuma@gmail.com

Volume 20 Nomor 3 Januari 2023: DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> *Article History*
Submission: 22-11-2022 Revised: 04-12-2022 Accepted: 11-12-2022 Published: 10-01-2023

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the effectiveness of the Tourism Office's duties in managing tourism development in Ende Regency and to find out the factors that hinder the management of tourism development in Ende Regency. The use of this research is as a contribution to the body of legal science, especially constitutional law and as the development of constitutional law knowledge, especially regarding the management of tourism development and as material for academic studies in the field of law. In order to answer these problems, research was carried out using the Qualitative Descriptive Analysis method in accordance with the data obtained while still paying attention to theory, principles and legal principles, so this research is research that originates from primary and secondary data using an empirical juridical approach.

That in the results of this study, the main issues examined by the researchers explain the implementation of the duties of the Tourism Office in managing tourism development, namely the Tourism Office of Ende Regency always strives to implement programs/activities every year to continue to increase both in quantity and quality so that services to the community can be fulfilled. In addition to encouraging/increasing public awareness in the field of tourism (tourism awareness), this effort is also a concern for poverty alleviation efforts, job creation, economic growth, as well as concern for environmental preservation and the factors that hinder the management of tourism development in Ende Regency, namely human resources, infrastructure and infrastructure, budget and legal awareness of the community.

Based on the results of the research that has been done, the authors provide advice related to this problem: The researcher wants to increase the implementation of the duties of the Tourism Office in terms of managing tourism development in Ende Regency so that all tourist objects in Ende Regency can be known by local and foreign tourists and There is a need for the development of human resources in Ende Regency because human resources are an important element in the implementation of tourism development in Ende Regency, supporting facilities and infrastructure so that they can assist parties from the Tourism Office to help achieve the realization that their work programs are implemented properly.

Keywords: *Tourism Office; Management; Tourism Development.*

ABSTRAK

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas tugas Dinas Pariwisata dalam mengelola pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Ende dan Untuk mengetahui faktor yang menghambat pengelolaan pembangunan Kepariwisataaan Di Kabupaten Ende. Kegunaan dari



Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License. Copyright @ 2020 IAI Al Qodiri Jember. All Rights Reserved p-ISSN 2252-4371 | e-ISSN 2598-8735

penelitian ini adalah Sebagai sumbangan pemikiran bagi kasanah ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Tata Negara dan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Tata Negara, khususnya mengenai Pengelolaan Pembangunan Pariwisata dan Sebagai bahan kajian akademik dalam bidang ilmu hukum. Guna menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif sesuai dengan data yang diperoleh dengan tetap memperhatikan teori, asas dan kaidah hukum maka, penelitian ini merupakan penelitian yang bersumber pada data primer dan sekunder dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris.

Bahwa dalam hasil penelitian ini, pokok permasalahan yang di teliti oleh peneliti menjelaskan pelaksanaan tugas Dinas Pariwisata dalam mengelola pembangunan pariwisata yaitu Dinas Pariwisata Kabupaten Ende selalu berupaya untuk mengimplementasikan program/kegiatan setiap tahun tetap meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya agar pelayanan terhadap masyarakat dapat terpenuhi. Usaha ini disamping untuk mendorong/meningkatkan kepedulian masyarakat bidang kepariwisataan (sadar wisata) juga sebagai kepedulian terhadap upaya pengentasan kemiskinan, pembukaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi juga kepedulian terhadap pelestarian lingkungan dan faktor yang menghambat pengelolaan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Ende yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, anggaran dan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan maka penulis memberi saran terkait masalah tersebut adalah Peneliti ingin Perlu adanya peningkatan dalam pelaksanaan tugas dari Dinas Pariwisata dalam hal mengelola pembangunan pariwisata di Kabupaten Ende Sehingga seluruh obyek wisata yang ada di Kabupaten Ende dapat diketahui oleh wisatawan lokal maupun mancanegara dan Perlu adanya pengembangan sumber daya manusia di kabupaten ende karena sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan wisata di Kabupaten Ende, menunjang sarana dan prasana sehingga dapat membantu pihak dari Dinas Pariwisata untuk membantu pencapaian realisasi program kerjanya terlaksana secara baik.

Kata Kunci: *Dinas Pariwisata; Pengelolaan; Pembangunan Pariwisata.*

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia, pembangunan pariwisata juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional sebagai instrumen peningkatan perolehan devisa maupun lapangan kerja. Sektor pariwisata juga membawa dampak sosial, ekonomi, maupun dalam konteks pelestarian dan pengelolaan lingkungan, sumber daya alam, dan budaya yang semakin arif dan bijaksana. Prospek yang sangat strategis pada sektor pariwisata tersebut tentu menjadi peluang yang sangat berarti bagi Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki kekayaan alam dan budaya yang sangat besar yang membentang dan tersebar di lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) pulau.. Dalam konteks tersebut, maka pengembangan sektor pariwisata harus digarap secara serius, terarah, dan profesional agar pengembangan dan pemanfaatan aset-aset pariwisata dapat memberi kontribusi signifikan dalam mewujudkan peran sektor pariwisata sebagai sektor andalan dalam pembangunan di masa depan.

Kabupaten Ende sebagai destinasi wisata yang memiliki tempat-tempat yang dapat dinikmati keindahannya baik wisata alam, budaya, sejarah, seni dan lainnya. Sektor pariwisata sesungguhnya merupakan sektor yang sangat potensial dan mempunyai prospek pengembangan di



kabupaten ende. Namun, sektor tersebut belum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Hal tersebut dapat diamati dari adanya berbagai potensi wisata, baik wisata budaya maupun wisata alam yang belum di kelola atau dikembangkan. Padahal sektor pariwisata dapat menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional (Pasal 1) menjelaskan bahwa kepariwisataan adalah seluruh kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata menjelaskan bahwa kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan, kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Maka dengan demikian, seharusnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dan memiliki peran dalam pengembangan pariwisata memberikan perhatian yang lebih terhadap pariwisata, baik itu dukungan fasilitas maupun layanan terhadap wisatawan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata digariskan bahwa pembangunan pariwisata perlu ditingkatkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan penerimaan devisa serta memperkenalkan alam kebudayaan bangsa Indonesia. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk menikmati waktu luang dengan berwisata, perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan bangsa dengan tetap menempatkan kebhinekaan sebagai suatu yang hakiki dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ende merupakan sebuah kabupaten yang tepat berada di tengah Pulau Flores yang dijuluki Kaum Portugis dengan sebutan “Nusa Bunga”, dan membelah pulau menjadi 2 bagian. Dengan posisi strategis ini menjadikan Kabupaten Ende sebagai pintu masuk perdagangan baik menuju ke arah barat timur Pulau Flores. Ada 3 suku besar yang menjadi penduduk asli Kabupaten Ende, yakni Suku Ende (untuk masyarakat yang bermukim di pesisir selatan Kabupaten Ende, Suku Ngao dan Suku Lio (untuk masyarakat yang bermukim di pesisir utara kabupaten Ende).



B. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Pelaksanaan Tugas dinas Pariwisata dalam Mengelola Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ende

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 11 Tahun 2016, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Ende mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, dengan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende tertuang dalam Peraturan Bupati Ende Nomor: 35 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja dinas daerah Kabupaten Ende.

Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Ende dijabarkan dengan hal-hal berikut:

- a. Penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- c. Pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;
- d. Pengelolaan pengembangan industri pariwisata;
- e. Penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- f. Pengelolaan pengembangan kapasitas dan kelembagaan
- g. Pemberian fasilitasi bidang pariwisata;
- h. Pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pariwisata;
- i. Pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
- j. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
- k. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Kepala Daerah sesuai dengan fungsi dan tugasnya.
- m. Pelaksanaan kerjasama bidang pariwisata dengan Pemerintah maupun Swasta di tingkat Regional, Nasional dan Internasional.

Berdasarkan hasil penelitian, objek pariwisata yang sudah dikelola secara baik dan dikelola sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende antara lain Taman Wisata Bahari (Pantai Ende), Pemandian Air Panas (Detusoko), dan Sa'o Ria (Moni). Sedangkan objek pariwisata lainnya masih dikelola sendiri oleh masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak terdapat objek pariwisata di Kabupaten Ende yang belum sepenuhnya dikelola secara baik serta belum sepenuhnya melibatkan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende sehingga perkembangan pengelolaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Ende menjadi terhambat.



b. Penyusunan Program dan Kebijakan Teknis Tentang Tugas Kepariwisata

Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang dikehendaki. Penyusunan program berfungsi untuk menata program-program untuk yang untuk dilaksanakan dalam pelaksanaan kerja kepariwisataan. Menurut Sutarno “perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang hal yang akan dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu, dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksana dan bagaimana tatacara mencapai hal tersebut”.⁸

Arti penting perencanaan terutama adalah memberikan kejelasan arah bagi setiap kegiatan, sehingga setiap kegiatan dapat diusahakan dan dilaksanakan seefisien dan seefektif mungkin. Perencanaan dapat dibedakan dalam tiga bentuk, yaitu:

1. Rencana global yang merupakan penentuan tujuan secara menyeluruh dan jangka panjang.
2. Rencana strategis merupakan rencana yang disusun guna menentukan tujuan-tujuan kegiatan atau tugas yang mempunyai arti strategis dan mempunyai dimensi jangka panjang.
3. Rencana operasional yang merupakan rencana kegiatan-kegiatan yang berjangka pendek guna menopang pencapaian tujuan jangka panjang, baik dalam perencanaan global maupun perencanaan strategis.¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende mereka telah melakukan suatu perencanaan demi mengelola pembangunan pariwisata di Kabupaten Ende. Perencanaan yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai tersebut dalam jangka panjang yaitu dimuat dalam Rencana Strategis (Resentra) Kepariwisata Kabupaten Ende dan dalam jangka pendek yaitu program yang direncanakan bersama untuk satu tahun anggaran.² Rencana Strategis (Resentra) Dinas pariwisata Ende mengemukakan program-program serta kebijakan yang untuk dicapai bersama demi mewujudkan visi dan misi dari dinas pariwisata ialah sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Destinasi

Tujuan dari program ini ialah meningkatkan kualitas dan kuantitas Daya Tarik Wisata yang mampu mendorong peningkatan jumlah kunjungan.

¹ Sutarno. 2004. *Manajemen Perpustakaan*. Jakarta : Samitra Media Utama. Hlm. 109.

² Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Bapak Drs. Derson Duka di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tanggal 26-11-2018 Pukul 09.00



2. Program Pengembangan Pemasaran

Tujuannya adalah mewujudkan media pemasaran yang efektif dan efisien untuk meningkatkan citra Kawasan Pariwisata Kabupaten Ende demi peningkatan kunjungan wisatawan baik manca negara maupun domestik.

3. Program Pengembangan Destinasi dan Industri

Tujuannya Mewujudkan industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian Daerah melalui peningkatan kerjasama antar usaha Pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

4. Program Pengembangan Kemitraan

Tujuannya Mengembangkan lembaga Kepariwisata dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri Pariwisata, Kawasan Pariwisata, dan pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

5. Program Pengembangan Destinasi dan Industri, Program Pengembangan Pemasaran dan Program Pengembangan Kemitraan. Tujuan dari program ini ialah mewujudkan masyarakat sadar Wisata untuk mendukung tercapainya Sapta Pesona.

6. Program Pengembangan Kapasitas Aparatur. Tujuannya adalah Meningkatkan pelayanan publik yang profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keenam program tersebut dengan melalui berbagai kegiatan-kegiatan yang strategis, prioritas, efektif dan efisien yang telah disinergikan dengan stakeholders terkait maupun masyarakat dapat mewujudkan capaian yang telah ditargetkan dalam RPJMD Kabupaten Ende. Dari program dan perencanaan tersebut untuk mewujudkan visi dan misi yang diharapkan, maka ditetapkan kebijakan strategis umum yang menjadi acuan dalam pengembangan kepariwisataan daerah berbasis masyarakat dengan didukung oleh karya-karya inovatif, penguatan/penajaman pemasaran, peningkatan aksesibilitas dan konektivitas, pengembangan SDM pariwisata, serta sinergitas antar pelaku wisata, melalui:

1. Peningkatan peran pariwisata sebagai basis penggerak perekonomian daerah;
2. Peningkatan manajemen kepariwisataan yang berbasis ekonomi lokal.
3. Peningkatan kerjasama dan koordinasi yang sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat



dalam mendorong pariwisata sebagai core competence/ kompetensi inti daerah;

4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan/ pengembangan destinasi wisata (daya tarik wisata) yang berkelanjutan.
5. Peningkatan pemasaran pariwisata Kabupaten Ende yang efektif dan efisien yang berorientasi pasar baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarpras dan fasilitas penunjang kegiatan pariwisata dan optimalisasi pengembangan potensi pendukungkepariwisataan.
7. Peningkatan sadar wisata dan sapta pesona serta partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan pembangunan pariwisata Kabupaten Ende yang berkelanjutan.

c. Pelaksanaan Kerja Kepariwisataan

Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan program atau perencanaan yang telah dibuat. Tujuan dari pelaksanaan kerja kepariwisataan ialah untuk mencapai suatu tujuan dari keenam program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Ende untuk masyarakat secara langsung dapat dilihat atau tercermin dalam pelaksanaan belanja langsung program/kegiatan setiap tahunnya. Walaupun realisasi belanja langsung tidak sesuai dengan usulan perencanaan awal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ende (hal ini disesuaikan kemampuan APBD) setidaknya dari tahun 2013 - 2015 besaran belanja langsung lebih besar 2 kali lipat dengan belanja tidak langsung/ belanja pegawai. Diharapkan tahun- tahun berikutnya belanja langsung ke masyarakat oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Ende maupun melalui stakeholders lainnya terus meningkat. Sedangkan pelaksanaan program/kegiatan belanja langsung hubungannya dengan target kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende yang sudah tertera dalam RPJMD Kabupaten Ende diharapkan realisasi/capaian kerjanya dapat tercapai/terlampau.³

d. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepariwisataan

Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis dilaksanakan sesuai jenjang struktur dan bidang tugas masing-masing. Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis tidak terlepas kaitannya dengan pengukuran kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ende yang menunjukkan sampai

³ Hasil Wawancara dengan Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan Bapak Martinus Lagho, SST. Par di Kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pada Tanggal 27-11-2018 Pukul 10.00



seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator yang telah dirumuskan. Kegiatan monitoring dan evaluasi Rencana Strategis dilakukan dengan tertib dan efektif, serta hasilnya disampaikan dalam bentuk laporan tertulis dengan memperhatikan prinsip-prinsip Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Kegiatan monitoring dimaksud untuk mengetahui realisasi program dari Dinas Pariwisata Kabupaten Ende.

Evaluasi umum pelaksanaan Rencana Strategis dilaksanakan pada akhir periode dan dibuat sebagai evaluasi resmi kinerja Tahunan dan lima Tahunan Dinas Pariwisata dalam menjabarkan capaian Rencana Strategis sekaligus sebagai pertimbangan dalam penyiapan Rencana Strategis periode berikutnya. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Kabupaten Ende pada Tahun 2014-2018 dapat dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi seluruh pihak yang terkait (*stakeholder*).

e. Faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan wisata di Kabupaten Ende baik dari pihak Dinas Pariwisata maupun dari pihak masyarakat. Kelemahan dari pihak Dinas Pariwisata merupakan kurangnya kepekaan, kreatifitas dan kurang memahami betul tugas dan kewajiban yang harus dilakukan oleh dinas pariwisata. Sedangkan untuk masyarakat Kabupaten Ende yang masih tergolong SDM yang kurang baik karena kurangnya pendidikan yang dimiliki SDM tersebut dan kurangnya pelatihan untuk menambah kemampuan dari SDM tersebut khususnya dalam bidang pariwisata sehingga mempermudah dan mendukung pembangunan pariwisata.

Hal lain yang mempersulit pembangunan pariwisata karena kurangnya jumlah pegawai dalam Dinas Pariwisata Kabupaten Ende. Tingkat pendidikan dari masyarakat di Kabupaten Ende juga masih kurang, karena di Dinas Pariwisata Kabupaten Ende membutuhkan tingkat pendidikan minimal Sarjana tapi Rata-rata Masyarakat di Kabupaten Ende tingkat pendidikannya paling tinggi adalah Sma dan factor penghambat terakhir ialah kurangnya pengalaman kerja yang dimiliki oleh masyarakat di Kabupaten Ende, karena setiap instansi memerlukan karyawan yang memiliki pengalaman kerja. Terutama masyarakat yang berada di sekitar lokasi wisata yang tidak mempunyai pengertian yang baik manfaat dan dampak dari pengelolaan tempat wisata sehingga sering terjadi kesalahpahaman antara petugas dengan



masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang yang membantu pencapaian realisasi program-program yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata. Menilik dari lokasi pariwisata dengan letak geografis yang sulit diakses karena lokasi antara tempat wisata berjauhan dan infrastruktur kurang baik maka sarana dan prasarana yang tersedia tidak memadai atau tidak mencapai standard seperti yang tertuang pada table berikut:

Tabel 1.3

Data Aset Dinas Pariwisata Kabupaten Ende

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KEADAAN			KET.
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Tanah	4 bidan g	4			Kantor, Moni, Detusoko, Pantai Kotaraja.
2.	Mobil Dinas	1	1			
3.	Sepeda Motor	8	8			
4.	GPS	1	1			
6.	Mesin Ketik Manual	5			5	
7.	Filling Cabinet	2	1		1	
9.	Papan Nama Instansi	1	1			
10.	Papan Pengumuman/Petunjuk	10	9		1	
11.	Whiteboard	3	3			
18.	TV	2	1		1	
19.	Wireless	4	1		3	
20.	Kamera	7	3		4	
21.	Handycam	3	1		2	
22.	Komputer (PC Unit)	4	1		3	
23.	Mobile computer/ Laptop	4	3		1	
24.	Notebook	4	4			
25.	Printer	12	4	3	5	
26.	Scanner	1			1	
27.	Finger Scanner	1	1			
28.	Meja Kerja Staf	17	16		1	



Sumber : Sekretariat Dinas Pariwisata Kab. Ende, 2018

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa banyak dari sarana dan prasarana yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Ende, sehingga tidak dapat membantu pencapaian program-program yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata. Seperti mobil dinas yang tidak memadai dan hanya berjumlah 1 unit, Wireless yang tidak memadai sehingga tidak bisa mengakses informasi dari internet dan tidak berfungsinya 3 dari 4 unit Pc Komputer yang merupakan sarana utama untuk pengembangan pariwisata baik dari pengolahan data maupun informasi.

3. Anggaran

Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ende, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende didukung dana yang berasal dari APBD II maupun APBN. Tetapi dana yang dianggarkan kurang maksimal karena itu menyebabkan adanya kendala dalam pembangunan dan pengelolaan tempat pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Drs. Derson Duka Selaku Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Ende mengatakan anggaran merupakan salah satu faktor yang menghambat berbagai pelaksanaan program kegiatan untuk pengembangan pariwisata di Ende beliau juga mengatakan bahwa dengan pendapatan APBD yang masih tergolong rendah juga berpengaruh pembagian anggaran ke setiap sector dinas yang tidak sesuai dengan perencanaan anggaran.

4. Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan tolak ukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dinas pariwisata. Kesadaran hukum dari masyarakat yang tinggi untuk membantu pembangunan pariwisata tersebut dengan menjaga dan melestarikan objek wisata tersebut. Dengan kesadaran hukum masyarakat yang baik akan sangat membantu dinas pariwisata untuk mengelola dan melestarikan bersama tempat pariwisata. Kesadaran hukum yang dimaksud disini ialah adanya kesadaran dari masyarakat untuk membantu menjaga dan mengembangkan berbagai macam objek yang ada di Kabupaten Ende. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber dalam tabel 1.4 diatas, yakni masyarakat yang tinggal di sekitaran lokasi wisata pada Kabupaten Ende, hampir sebagian besar masyarakat tahu dan



mengerti tentang potensi pariwisata yang ada di daerah mereka.⁴

Namun, masyarakat belum sepenuhnya memahami potensi pariwisata yang ada di daerah mereka, melainkan lebih memilih menjadi petani sebagai sumber utama penghasilan mereka. Hal ini berakibat pada kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga dan mengelola potensi pariwisata secara maksimal di daerahnya, ditunjukkan dengan masih banyaknya masyarakat yang tidak menjaga kebersihan dengan masih membuang sampah sembarangan serta tidak menjaga bahkan seringkali merusak fasilitas pada tempat wisata di daerah mereka. Hasil wawancara dengan salah satu warga yang tinggal di sekitaran objek pariwisata Pemandian Air Panas Detusoko Bpk. Primus Nggala “Saya mengerti tentang potensi pariwisata yang ada di daerah saya, namun karena saya tidak ada uang saya lebih memilih bertani. Saya tidak terlalu peduli dengan objek wisata ini karena sebenarnya sudah ada yang mengelola dan mereka juga dapat uang untuk jaga, jadi saya hanya pikir saya punya kebun untuk dapat uang sehari-hari”.

C. KESIMPULAN DAN SARAN TINDAK LANJUT

a. Simpulan

1. Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pariwisata menjalankan tugas untuk mencapai sasaran yang menjadi dari perencanaan program yang ada.
2. Penyusunan program dan kebijakan teknis tentang tugas kepariwisataan.

Perencanaan adalah suatu pemeliharaan yang berhubungan dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan demi mencapai hasil yang di kehendaki. Penyusunan program berfungsi untuk menata program-program untuk yang untuk dilaksanakan dalam pelaksanaannya kerja kepariwisataan.

3. Pelaksanaan Kerja Kepariwisataan

Pelaksanaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengimplementasikan program atau perencanaan yang telah dibuat. Tujuan dari pelaksanaan kerja kepariwisataan ialah untuk mencapai suatu tujuan dari keenam program tersebut.

4. Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Tugas Kepariwisataan

Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis dilaksanakan sesuai jenjang struktur dan bidang tugas masing-masing. Monitoring dan evaluasi Rencana Strategis tidak terlepas

⁴ Hasil wawancara dengan salah satu warga yang bertempat tinggal di sekitar objek wisata



kaitannya dengan pengukuran kinerja pada Dinas Pariwisata Kabupaten Ende yang menunjukkan sampai seberapa jauh pencapaian tujuan dan sasaran serta indikator yang telah dirumuskan.

5. Ada Beberapa Faktor Yang Menghambat Pengelolaan Pembangunan Kepariwisata Di Kabupaten Ende Sebagai Berikut :

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan wisata di Kabupaten Ende baik dari pihak Dinas Pariwisata maupun dari pihak masyarakat.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan alat penunjang yang membantu pencapaian realisasi program-program yang direncanakan oleh Dinas Pariwisata.

c) Untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Ende, Dinas Pariwisata Kabupaten Ende didukung dana yang berasal dari APBD II maupun APBN.

d) Kesadaran hukum masyarakat juga merupakan tolok ukur berhasil atau tidaknya pelaksanaan program dinas pariwisata.

b. Saran Tindak Lanjut

Berdasarkan penjelasan kesimpulan di atas peneliti memiliki beberapa saran untuk masalah di atas, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah Kabupaten Ende melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Ende harus melakukan tugasnya dalam pengelolaan pembangunan pariwisata di Kabupaten Ende sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pariwisata.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Ende melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Ende harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang merupakan elemen penting dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata, menunjang dan memaksimalkan anggaran maupun sarana dan prasarana agar pencapaian realisasi program kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Ende Terlaksana secara baik. Serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat untuk mendukung perkembangan pembangunan pariwisata.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Halim. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat : Jakarta.
- Abdullah, Rozali 2007. Pelaksanaan otonomi luas dengan pilihan kepala daerah secara langsung. Raja. Jakarta: Grafindo Persada.
- Abubakar Busro & Abu Daud BusroH, 1984, Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 1993. Manajemen Penelitian. PT. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Afrizal. 2014. Metode Penelitian Kualitatif; Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Asshidiqie, Jimly, 2009. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta : Raja .Demokrasi, Yogyakarta: Buku Panji.
- Asman, Khelda Ayunita dan Abd. Rais, 2016, Hukum Tata Negara. Indonesia, Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Bintoro, Tjokroamidjojo, 1995. Perencanaan Pembangunan, PT Gunung Agung, Jakarta.
- HAW, Widjaja (2007). Penyelenggaraan otonomi daerah. di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hanif Nurcholis, 2007 . Teori dan praktik pemerintahan dan otonomi daerah. Grasindo : Jakarta.
- Harun, Rochajat, & Ardianto, Elvaniro. 2011. Komunikasi Pembangunan & Perubahan Sosial: Perpeftif Dominan, Kaji Ulang dan Teori Kritis. RajawaliPers : Jakarta.
- Karyono, Haris, 1997. Kepariwisata. PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi sektor public. Yogyakarta: Penerbit Andi. Hlm 46 Mill, Robert, dan Mirrison. 1985 . The Tourism Systim. Jarsley: Prentice Hall International
- S.H Sarundajang, 2002. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah, Pustaka SinarHarapan Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2006. Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Penelitian Hukum, Ed.3 Jakarta : UI Press Yoeti, Oka A. 1991 . Pengantar Ilmu Pariwisata. Angkasa : Bandung

Undang-undang

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisata Nasional
- Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Ende.

